

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA
PENYELENGGARA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN (PIIP) DI KECAMATAN LAMASI TIMUR
KABUPATEN LUWU**

***The Public Perception of Organizers Performance of
Development Program Infrastructure (PIIP) in East Lamasi
District Luwu Regency***

Nur Fatma

Manajemen PPs STIE Amkop, Makassar

Email: nurfatma@gmail.com

Sosiawan

PPs STIE Amkop, Makassar

Email: sosiawan@gmail.com

Gunawan

PPs STIE Amkop, Makassar

Email: fadelgun@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat di Desa Pompengan Tengah dan Desa Pompengan Utara Terhadap Kinerja Fasilitator Masyarakat (FM) dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pompengan Tengah dan Desa Pompengan Utara dengan mengambil responden dan informan dari masyarakat, pemerintah setempat dan pelaksana PIIP. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai belum maksimalnya kinerja penyelenggara PIIP di Desa Pompengan Tengah dan Desa Pompengan Utara. Hal ini di karenakan pelaksanaan PIIP tidak secara merata disetiap Dusun,

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Kinerja PIIP.

ABSTRACT

This study aims to know Public Perception in the Middle Pompengan Village and Village of North Pompengan Performance Against Community Facilitator (FM) in Implementation of Rural Infrastructure Development Program (PPIP). This research was conducted at the village of North Pompengan and middle Pompengan, by taking the respondents and informants from the community local government and PPIP Workers. Data was collected by using observation, interview, and documentation. Data were analyzed with qualitative analysis approach. The results showed that communities assets that workers performance were not maximal yet, at middle Pompengan Village and North Pompengan Village. This is caused that implementation of the PPIP is not evenly at every hamlet.

Keywords: *Community Perception, Workers Performance of PPIP*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan program oleh masyarakat sangat ditentukan pada sejauhmana masyarakat desa sebagai pelaku dan penerima bantuan dapat merealisasikan kegiatan secara teknis dan nonteknis, untuk itu dituntut adanya kemampuan dalam memahami seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan secara sistimatis dan memahami perangkat instrument format serta seluruh sub item kegiatan pada masing-masing tahapan sampai selesainya terbangun infrastruktur yang dipilih oleh masyarakat.

Status desa yang merupakan sasaran bantuan masih sebagian besar berada pada kondisi sebagai Desa Tertinggal, Desa Pompengan Utara dan Desa Pompengan Tengah di kecamatan Lamasi Timur Timur masih terisolasi dan terpencil. Kondisi ke dua desa ini dipastikan memiliki potensi yang cukup tinggi, namun karena status keberadaannya belum dapat dimaksimalkan akibat karena status tersebut. Hal ini memberikan inplikasi bahwa desa tertinggal dan terpencil akan berbanding lurus dengan keberadaan masyarakatnya terkait dengan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam hal pemahaman suatu program yang memiliki bobot pengetahuan yang cukup baik secara teknis maupun non teknis.

Fenomena yang penulis temukan di lapangan terkait dengan kinerja PPIP, masih tampak adanya permasalahan. Sebagaimana yang penulis temukan diantaranya LSM yang sering datang dan mengunjungi objek lokasi pelaksanaan PPIP, dimana LSM senantiasa mengkritik pamflet yang terpasang di kantor Desa. LSM menilai bahwa sebaiknya pamflet yang digunakan diganti, namun PPIP mencoba untuk menjelaskan bahwasanya pengadaan pamflet ini bukan proyek yang mempunyai anggaran yang banyak dimana Program Pembangunan ini dananya berasal dari BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Disamping itu, adanya

kecenderungan masyarakat sekitar yang merasa tidak senang karena lokasi PPIP berjauhan dengan lahan pertanian ataupun kebun masyarakat, hal inilah mengakibatkan adanya kecenderungan masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program PPIP ini. Oleh karena itu, diperlukan peranan para Fasilitator Masyarakat yang memiliki keterampilan yang baik untuk mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Desa

Karakteristik desa sangat diperlukan adanya pembagian desa atau biasa disebut dengan tipologi desa. Tipologi desa itu sendiri akan mudah diketahui jika dihubungkan dengan kegiatan pokok yang ditekuni oleh masyarakat itu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, adapun pembagiannya sebagai berikut (Jefta Leibo, 1995)

a. Desa Pertanian

Pada jenis desa ini semua kegiatan masyarakatnya terlibat dalam bidang pertanian.

b. Desa Industri

Pada jenis desa ini pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lebih banyak bergantung pada sektor industri baik industri kecil maupun industri besar.

c. Desa Nelayan atau Desa Pantai

Pada jenis desa ini pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakatnya bersumber pada usaha-usaha di bidang perikanan baik perikanan laut, pantai, maupun darat.

d. Desa Pariwisata

Pada jenis desa ini terdapat obyek wisata seperti peninggalan-peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, dan juga terdapat keindahan alam.

Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo, (dalam Novrasagelin, 2012) mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut: "Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa."

Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan

keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

Teori Persepsi

Persepsi memiliki berbagai pengertian menurut para ahli antara lain:

- a. Menurut Hanurawan (2007) “persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya”.
- b. Menurut Thoha (2004) persepsi pada hakikatnya adalah “proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman”.
- c. Krech (dalam Thoha, 2004) persepsi adalah “suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari kenyataannya”.

Proses pembentukan persepsi diawali dengan masuknya sumber melalui suara, penglihatan, rasa, aroma atau sentuhan manusia, diterima oleh indera manusia (*sensory receptor*) sebagai bentuk sensation. Sejumlah besar sensation yang diperoleh dari proses pertama diatas kemudian diseleksi dan diterima. Fungsi penyaringan ini dijalankan oleh faktor seperti harapan individu, motivasi, dan sikap.

Teori Tentang Kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja dari kata kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Lebih lanjut Mangkunegara (2007) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Nawawi (2004) menyatakan bahwa, “Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/ material maupun non fisik/ non material.

Terdapat beberapa tujuan penting dari program penilaian kinerja yang tidak dapat dicapai dengan metode lain. Menurut Simamora (2001) bahwa tujuan pokok sistem penilaian kualitas kinerja adalah menghasilkan informasi yang akurat tentang pedlaku dan kinerja anggotaanggota organisasi. Semakin akurat informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian kualitas kinerja, semakin besar potensi nilainya bagi organisasi.

Berdasarkan tujuan penilaian kinerja tersebut di atas, terdapat pula masalah-masalah penilaian kinerja yang dapat menghambat pencapaian tujuan penilaian kinerja. Masalah-masalah proses penilaian kinerja haruslah dikenal dan diminimalkan

oleh penyelia yang terlatih, orang yang seyogyanya tidak hanya mengetahui masalah-masalahnya saja, tetapi juga mempelajari bagaimana menghindari kesalahan-kesalahan penilaian yang lazim terjadi. Semua metode penilaian kinerja merupakan subyek bagi kesalahan, tetapi manajemen dapat menghalau kesalahan-kesalahan dan permasalahan penilaian kinerja melalui pendidikan, latihan dan motivasi. Pangabean (2004).

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Maksud PPIP sebagai upaya mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan Tujuannya adalah untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas ke pelayanan infrastruktur dasar permukiman, yang mendukung pengembangan potensi desa dengan berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Komponen utama PPIP yaitu:

- a. Penguatan Kapasitas Perencanaan masyarakat.
- b. Peningkatan Layanan dan Penyediaan infrastruktur pemukiman perdesaan.
- c. Peningkatan kapasitas pelaksanaan dan pengendalian.

Prinsip PPIP yaitu : Dapat diterima, Transparansi, Akuntabel dan Berkelanjutan. Pendekatannya adalah: Pemberdayaan masyarakat, Keberpihakan kepada orang miskin, otonomi dan desentralisasi, partisipatif, keswadayaan, keterpaduan program pembangunan, penguatan kapasitas kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender, berbasis sumberdaya dan potensi desa. Keberhasilan PPIP dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Mendukung upaya penurunan angka kemiskinan di desa sasaran.
- b. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan partisipatif,
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat (dan perempuan) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan partisipatif, Peningkatan layanan dan infrastruktur desa melalui penyaluran dana BLM, dan peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan program dan pemantauan dan evaluasi

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (positivis). Pendekatan kualitatif menggunakan cara berfikir deduktif, dengan melihat pola umum ke khusus. Dalam hal ini, pola yang umum tersebut adalah kerangka teoritis yang digunakan, sedangkan pola yang khusus adalah realitas yang ditemukan peneliti di lapangan.

Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dilakukan mulai dari bulan januari sampai maret 2015.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah yang mempunyai kaitan di orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan PPIP di tingkat perdesaan. Dan demi menguji kualifikasi penelitian narasumber dapat diambil dari penyelenggara mulai dari Provinsi sampai kabupaten. Penyelenggara ditingkat desa seperti OMS (Organisasi Masyarakat Setempat), KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara), KD (Kader Desa), dan FM (Fasilitator Masyarakat). Populasi yang diambil adalah seluruh masyarakat di desa pompengan tengah dan desa pompengan utara yang berumur diatas 17 tahun atau telah menikah. Oleh sebab jumlah populasi yang sangat banyak maka sampel dibatasi sebanyak 10 orang setiap dusun dengan KK yang berbeda

Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biglen (Moleong, 2007) analitis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milalahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

HASIL PENELITIAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Penyelenggara PPIP

Persepsi masyarakat terhadap kinerja penyelenggara PPIP di Desa pompengan tengah dan Desa pompengan utara secara keseluruhan berada pada kategori netral. Hal ini menunjukkan dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden bahwa baik di Desa pompengan tengah maupun Desa pompengan utara masyarakat tidak puas dari pelaksanaan PPIP, dimana data di lihat secara keseluruhan rata-rata variabel persepsi masyarakat sebesar 3,80 % dan rata-rata variable kinerja penyelenggara PPIP sebesar 3,46% . Akan tetapi, ada beberapa jawaban responden di setiap dusun yang ada di Desa pompengan tengah dan Desa pompengan utara ikut merasakan dari pelaksanaan PPIP.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima (terbukti) yaitu, diduga Bahwa Persepsi Masyarakat di Desa Pompengan Tengah dan Desa Pompengan Utara Terhadap Kinerja Penyelenggara Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tidak memuaskan. Ketidakpuasan masyarakat dengan adanya Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Pompengan Tengah dan Desa Pompengan Utara bisa saja timbul akibat kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan

pelaksana PPIP tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat tidak merasa puas dengan terlaksananya pembangunan infrastruktur di desanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cakrawijaya, dkk (2014) Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur yang dibangun melalui PPIP secara umum hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, dan bersifat sementara atau tidak berkelanjutan. Selanjutnya, Lina Kumala Dewi (2014) tentang partisipasi masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) di desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan rabat beton di Desa Ngranget berupa pikiran (perencanaan) tergolong rendah, partisipasi berupa tenaga tergolong tinggi, partisipasi berupa keahlian tergolong cukup rendah, dalam bentuk barang tergolong rendah, dan partisipasi bentuk uang tergolong sangat rendah.

Efektivitas Penyelenggaraan PPIP

Secara garis besar dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah perdesaan, maka program yang satu diantaranya adalah dibidang pembangunan infrastruktur perdesaan. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh bapak Sohaeril, Kepala Satker PPIP Kabupten Luwu yaitu:

“jadi kalau melihat sejarahnya PPIP ini diawali dari PKPS BBM IP pada tahun 2005 ya jadi Program dikhususkan untuk pembangunan Infrastruktur Perdesaan di desa tertinggal, desa tertinggal disini maksudnya itu desa yang secara infrastruktur itu masih banyak membutuhkan infrastruktur dasar” (Hasil wawancara dengan Sohaeril, 20 November 2015)

Adanya pembangunan infrastruktur yang di bangun di desa, maka masyarakat desa dapat melakukan mobilisasi lebih baik lagi. Sehingga perekonomian masyarakat desa juga akan terbantu dan meningkat melalui kegiatan-kegiatan yang masyarakat desa lakukan. Seperti perdagangan ke pasar menjadi lebih lancar karena akses yang sudah menjadi lebih mudah.

Dapat dikatakan bahwa dengan hadirnya PPIP dalam bantuan masyarakat perdesaan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa Indonesia kebijakan ini dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu desa. Ditambah lagi dengan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat, penyusunan rencana program, menentukan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan serta pengelolaannya. Senadadengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Luwu Askar, M.Si:

“Artinya kebijakan program penanganan kemiskinan melalui PPIP ini dan kemudian permasalahan yang ditemui di lapangan sebetulnya menjawab gak jauh-jauh amat melesetnya. Paling kalau pun meleset ya meleset lokasi, kalau meleset lokasi dia gak miskin kita kan gak tau persis kita dari angka-angka BPS. tapi kalau diukur berhasil ya kita sangat berhasil dengan pola itu, karena semua infrastruktur yang dia bangun dimanfaatkan. Kan bisa dilihat berhasilnya juga dari situ. Jika bangunannya di bangun tetapi tidak dimanfaatkan atau mereka tidak memelihara kita anggep kurang berhasil. Kalau PPIP kan hampir semuanya mereka senang” (Hasil wawancara dengan Askar, M.Si 20 November 2015).

Hal serupa di katakan pula oleh bapak Sohaeril, Kepala Satker PPIP Kabupten Luwu megenai tingkat keberhasilan PPIP yang artinya berhubungan dengan pemecahan masalah yang ada di desa-desa yaitu:

“Kalau keberhasilannya kita tidak mungkin menilai diri sendiri ya. Untuk itu kita kan selalu di audit setiap tahun kita di audit oleh BPKP baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Auditnya ini bukan audit keuangan, tetapi penekanannya pada kinerja jadi bukan hanya uang sekian masuk, uang sekian keluar saja. Karena kita ada proses pemberdayaan itu jadi yang di audit itu. Jadi yang di audit kinerja si fm itu bagaimana sih mendampingi masyarakat. Kinerja satker kabupaten bagaimana sih membimbing si fm, kinerja satker provinsi gimana sih membina kabupaten, kinerja pusat gimana sih mengeluarkan kebijakan bener gak sih nyusun jadwal, nyusun pedoman bener gak. Itu penekannya disitu walaupun ada keuangan tetap ada tekanan kinerjanya itu yang lebih utama. dari tahun ketahun lumayan nilai kita naik terus walaupun tipis-tipis gitu ya, tapi paling tidak naiklah. Tapi ya itu dari audit kita dari tahun ke tahun semakin baik” (Hasil wawancara dengan Sohaeril, 23 November 2015)

Berdasarkan dari pendapat kedua narasumber di atas, pihak pemerintah Kabupaten Luwu sebagai pembuat dan pemegang kebijakan merasakan bahwa kebijakan mengenai PPIP dapat memecahkan permasalahan yang ada. Terlebih lagi bila membandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang terdahulu yang tidak bersifat *open menu* sehingga masyarakat desa hanya menerima apa yang pemerintah berikan. Audit mengenai kinerja juga dilakukan bahkan dilakukan pula oleh pihak eksternal yaitu BPKP, kinerja yang bagus akan menghasilkan output yang baik sehingga dapat dikatakan kebijakan yang ada dapat menopang suatu program untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan masalah berkaitan pula dengan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang ada pada saat perumusan kebijakan itu berlangsung. Pada PPIP pertimbangan-pertimbangan itu langsung pada pokok permasalahan kemiskinan. Maka dengan itu dirumuskanlah kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat yang bersifat *bottom-up* guna mengatasi permasalahan yang ada di desa seperti yang juga dikatakan oleh Kepala Dinas Tata

Ruang dan Pemukiman Kabupaten Luwu Askar, M.Si seperti dibawah ini:

“Tekanan kemiskinan di kabupaten Luwu den lebih-lebih di pedesaan akibat dari masalah transisi ekonomi yang makro turbulensi ekonomi di Indonesi yang berdampak terhadap perekonomian di daerah. Saya yakin dengan mengidentifikasi permasalahan di pedesaan sebelum merumuskan kebijakan pembangunan, sehingga pelaksanaan PPIP akan berjalan dengan efektif.” (Hasil wawancara dengan Askar, M.Si, 20 November 2015)

Adanya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa dapat juga menjadikan masyarakat desa sebagai pekerjanya yang akan mendapatkan upah dalam PPIP, sehingga masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan dapat diberdayakan, dan memang orang-orang yang dipekerjakan dalam PPIP di suatu desa adalah masyarakat-masyarakat miskin di desa tersebut

Kesesuaian sasaran dengan perencanaan PPIP

Perencanaan PPIP di desa mayangan di jalankan oleh masyarakat, karena PPIP adalah program pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat disini aktor utamanya. Mulai dari perencanaan pembangunan sampai kepada pelaksanaan pembangunan bahkan tahap setelah pembangunan infrastruktur yaitu pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun, karena perencanaannya masyarakat yang menyusun dimaksudkan agar pembangunan yang dilakukan langsung mengenai pada sasaran yang desa tersebut dan langsung dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di desa tersebut. Selain itu masyarakat juga menjadi pengurus dalam proses PPIP berlangsung, mulai dari ketua organisasinya sampai pada pengerjaan infrastrukturnya. Seperti yang disampaikan oleh PPK satket Kabupaten Luwu bapak Ibrahim sebagai berikut:

“seperti yang saya bilang tadi ya masyarakat dilibatkan dalam hal mulai dari membentuk pengurusnya kan masyarakat juga, kemudian mereka dalam hal penyusunan RPJM nya kan masyarakat juga, terus dalam hal perencanaan masyarakat juga dilibatkan” (Hasil wawancara dengan, Ibrahim, 20 November 2015)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa pomengan Utara, Bapak Imran Kamarudin yaitu:

“Jadi ketika dibangun itu dibuat semacam panitia, namanya lupa lagi saya, yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan panitia itulah yang membangun jadi tidak melibatkan aparat desa jadi dari masyarakat dan yang memilih masyarakat” (Hasil wawancara dengan Imran Kamaruddin, 20 November 2015)

Pada proses perencanaan juga tidak berjalan dengan mulus, tetapi hambatan itu hanya sekedar perbedaan pendapat mengenai infrastruktur apa yang nantinya akan di bangun di desa mayangan, tetapi dengan adanya musyawarah desa yang dilakukan oleh masyarakat dean dengan memperhatikan prioritas desa, maka masyarakat sepakat untuk membangun pintu air untuk mengatasi permasalahan

banjir rob yang sering terjadi dan membangun sumber air dengan menggunakan jetpam yang di aliri kerumah masyarakat karena mengingat sulitnya untuk mendapatkan air bersih di desa pompengan tengah. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa pomengan tengah, Bapak Rakhmat yaitu:

“Jadi ketika musyawarah desa itu memang banyak yang di usulkan masyarakat. Ada jalan, ada pintu air, ada air bersih dan lain sebagainya. Cuma yang paling diperlukan masyarakat karena ini menyangkut satu dusun maka pada waktu itu diputuskan dua. Yang prioritas satu pintu air satunya lagi air bersih. Karena mengingat banjirnya dan kekurangan air. yang peertama karena masyarakat sadar bahkan sangat sadar bahwa di dusun itu memang kalau air besar itu selalu kebanjiran terutama dari persawahan. Jadi kalau pintu air tidak berfungsi, sawah terancam dan masyarakat jelas terendam. Maka musyawarah itu benar-benar dijelaskan fungsi dan perkiraan dampak dari bangunan yang akan dibangun. Masyarakatpun akhirnya mengerti dan sepakat dengan hasil musyawarah” (Hasil wawancara dengan Rakhmat, 20 November 2015)

Dengan diputuskannya pembangunan pintu air dan air bersih yang akan dilakukan di desa pompengan tengah dari program PPIP, berbagai pertimbangan muncul karena adanya permasalahan yang ada di desa pompengan tengah. Sebagai desa tetangga hal ini di pertegas oleh kepala desa pompengan Utara, Bapak Imran Kamaruddin, yaitu:

“ehhm kalo yang ikut pada saat itu kan komponen masyarakat waktu itu juga dibuat ada lembaga masyarakat yang memang sebagai orang yang akan ikut berperan dalam perawatan dan sebagainya dan sosialisasinya. Nah kita banyak sosialisasi kepada masyarakat karena pada saat itu kondisi masyarakat memang benar-benar khususnya di desa pomengan tengah ini selalu tenggelam karena banjir air pasang atau banjir rob. Maka satu-satunya jalan untuk mengurangi dari itu dibuatnya pintu air, nah alhamdulillah sampe sekarang juga masih kita pake dan masih kita pergunakan, karena fungsinya pada saat air pasang itu kita tutup. Tapi pada saat air dari hulu turun nah itu kita buka. Jadi sebenarnya fungsinya ada dua karena saluran itu juga saluran pembuang. Terus juga ini untuk pembangunan air bersih itu juga dari sana anggarannya, jadi alhamdulillah sih dengan adanya PPIP itu terasa manfaatnya” (Hasil wawancara dengan Imran Kamaruddin, 20 November 2015)

Adanya perencanaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat desa Pompengan tengah dan Pompengan Utara, dibawah ini akan dibahas mengenai kelompok sasaran dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah adanya PPIP di desa Pompengan tengah dan Pompengan Utara dan bagaiman keadaan desa sebelum adanya PPIP di desa tersebut, sehingga dapat dilihat apa perencanaan yang telah masyarakat desa buat mengenai sasaran yang dituju atau tidak

Hubungan Persepsi Masyarakat dengan Kinerja Penyelenggara Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Popengan Utara mengatakan sebagai berikut :

“Ketidakhadiran masyarakat terutama kaum perempuan dalam kegiatan musyawarah desa karena masyarakat sibuk dengan aktivitas di siang hari dan masyarakat cenderung pasif walaupun hadir dalam setiap pertemuan atau musyawarah desa.” (Hasil wawancara dengan Imran Kamaruddin, 20 November 2015)

Tujuan PIIP itu sendiri adalah untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam PIIP masyarakat desa merupakan aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Oleh karena itu perlu dilakukan persiapan yang matang bagi keterlibatan masyarakat dan dengan adanya keluhan-keluhan masyarakat bukan berarti kinerja program buruk. Bisa juga berarti bahwa masyarakat menjadi terberdaya dan lebih sadar, peduli dan secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

Program ini akan mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memprioritaskan, merancang, melaksanakan, mengelola dan memantau program-program berbasis komunitas. Selain itu juga untuk penguatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat, peningkatan layanan dan infrastruktur desa. Senada dengan yang diungkapkan oleh Camat Lamasi Timur Bapak Drs. Esrom Lempu yaitu:

“Masyarakat dilibatkan dalam hal mulai dari membentuk pengurusnya kan masyarakat juga, kemudian mereka dalam hal penyusunan RPJM nya kan masyarakat juga, terus dalam hal perencanaan masyarakat juga dilibatkan” (Hasil wawancara dengan Drs. Esrom Lempu, 26 November 2015)

Sasaran desa pada penelitian ini ialah desa pompengan Tengah dan desa pomengan utara yang terletak di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi-selatan. desa pompengan Tengah dan desa pomengan utara termasuk desa miskin yang pada saat itu memiliki permasalahan banjir dan akses transportasi yang mengakibatkan sawah terendam air serta lambatnya hasil pertanian untuk dijual.

Berdasarkan hasil wawancara dan menghubungkannya dengan literature menjelaskan bahwa adanya hubungan partisipasi masyarakat dalam menunjang kinerja pembangunan infrastruktur di desa pompengan Tengah dan desa pomengan utara. Beberapa responden tidak merasakan dampak dari PIIP karena penyelenggaraan PIIP tidak secara menyeluruh di Desa Pompengan Utara dan Pompengan Tengah, karena implementasi program berdasarkan kebutuhan dan kondisi setiap desa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kinerja penyelenggara PIIP tidak terlihat di seluruh desa yang ada di kecamatan Lamasi Timur.

SIMPULAN

1. Persepsi masyarakat kurang setuju terhadap kinerja penyelenggara PPIP di Desa pompengan tengah dan Desa pompengan utara. Dalam artian, tidak meratanya penyelenggaraan PPIP di setiap Desa dan Dusun di Desa pompengan tengah dan Desa pompengan utara. Dalam hal ini, pembangunan hanya berada di desa tertentu dan dusun tertentu. Jadi masyarakat hanya merasakan dampaknya dimana terselenggaranya PPIP.
2. Penyelenggara Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) sudah efektif. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa keefektifan PPIP tidak hanya bisa diukur secara menyeluruh di Desa pompengan tengah dan Desa pompengan utara, Karena penyelenggaraan PPIP berdasarkan kebutuhan setiap desa maupun dusun.
3. Terdapat hubungan persepsi masyarakat terhadap kinerja penyelenggara PPIP di desa pompengan Tengah dan desa pomengan utara. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyelenggara PPIP tidak terlihat di seluruh desa yang ada di kecamatan Lamasi Timur. Melainkan ada beberapa desa maupun dusun yang ikut merasakan dampak dari pelaksanaan PPIP.

REFERENSI

- Cakrawijaya, dkk. 2014 *Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman*. Vol 25, No 2 . Institut Teknologi Bandung. <http://journals.itb.ac.id>
- Dewi, Lina Kumala. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun*. Universitas muhammadiyah Ponorogo. eprints.umpo.ac.id. tanggal 3 desember 2015.
- Hanurawan, Fattah. 2007. *Psikologi Sosial*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Leibo, Jefta. 1995. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Ke Tujuh PT*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset: Bandung
- Nawawi, Hadari. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis*. Gajah Mada University Press: Jogjakarta.
- Novrasagelin, Nokinda. 2012. *Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Study Kasus : Desa Mayangan, Kabuapten Subang Jawa Barat Universitas Indonesia* (skripsi). Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik program sarjana ilmu administrasi Universitas Indonesia: Depok.
- Pangabean, Mutiara S. 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bogor: GhaliIndonesia.
- Simamora, Henry. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2004. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim pelaksana PPIP Pusat. *Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2013 (cetakan kedua)*. Penerbit Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta: 2013
- _____, *Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2014 (cetakan pertama)*. Penerbit Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta: 2014